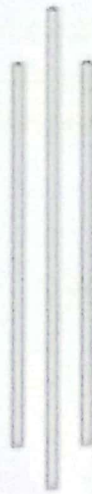




PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
(LKj)
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmatNya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2021 Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2021 merupakan laporan yang disampaikan oleh Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan kepada Bupati yang memuat hasil penyelenggaraan urusan kewilayahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Camat selama 1 (satu) Tahun Anggaran.

Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2021 menjadi dokumen laporan hasil kerja Camat mengenai capaian kinerja penyelenggaraan urusan kewilayahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

Demikian Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2021 disusun sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan urusan kewilayahan kecamatan yang berorientasi pada peningkatan kinerja.

Pasar Beriang, 31 Desember 2021

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN



MAR ALAM SYAH, SSTP, M.A

Perbina/ IV a

NIP. 19830310 200112 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	3
BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN	4
2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	4
2.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	5
2.3 Kebijakan Strategis Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	5
2.4 Penghargaan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	5
BAB III PENUTUP	6

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran Tahun 2021 disusun sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LKPJ memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang kemudian dibahas oleh DPRD untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1.2 DASAR HUKUM

Ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dalam penyusunan LKPJ Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pemerintah Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pejianjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Penyusunan LKPj Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan bermaksud agar terwujudnya Akuntabilitas Camat dalam melaksanakan Tugas Bupati yang dilimpahkan kepada Kecamatan yaitu urusan kewilayahan yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2021.

1.3.2 Tujuan

Dalam penyusunan LKPj ini bertujuan sebagai berikut:

1. Adanya keluaran berupa dokumen LKPj Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
2. Tersedianya media pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam pencapaian misi dan tujuan organisasi;
3. Terwujudnya *clean government* dan *good governce* pada Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan

BAB II
HASIL PENYELENGGARAAN TUGAS CAMAT
RANAH AMPEK HULU TAPAN

2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama sebagaimana Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan merupakan acuan dalam penyusunan dokumen-dokumen sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
2. Penetapan Indikator Kinerja Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
4. Evaluasi Kinerja Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
5. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;

Tabel 2.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Rumus Perhitungan	Satuan	Target	Realisasi	Interpretasi Capaian IKU
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	(Jumlah orang yang memilih puas atas pelayanan dalam kotak saran-Jumlah orang yang memilih tidak puas atas pelayanan dalam kotak saran) dibagi dengan total partisipasi orang dalam kotak saran dikali seratus = persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.	Persen	90	90	Tingkat kepuasan masyarakat meningkat terhadap pelayanan menggambarkan tingkat pelayanan kepada masyarakat semakin membaik
2.	Peningkatan Nilai LAKIP	1. 90-100 = AA/ Sangat Memuaskan 2. 80-90= A/ Memuaskan 3. 70-80= BB/ Sangat Baik	Kategori	80-90= A/ Memuaskan	70-80= BB/ Sangat Baik	Capaian Realisasi Nilai LAKIP belum mencapai Target menggambarkan

	4. 60-70= B/ Baik 5. 50-60= CC/ Cukup 6. 30-50=C/ Kurang 7. 0-30= D/ Sangat Kurang				kan Kinerja belum sesuai harapan dan perlu peningkatan.
--	--	--	--	--	---

2.2 Kebijakan Strategis

Kebijakan Strategis Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1	Penyusunan rencana pembangunan tahunan Kecamatan	Keputusan Camat tentang Penetapan Revisi Rencana Strategis Kecamatan Tahun 2021	Landasan, arah dan prioritas pembangunan dalam rangka perencanaan pembangunan tahunan kecamatan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan.

2.3 Penghargaan

Penghargaan yang diberikan kepada Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	PD/Badan Penerima Penghargaan	Tempat dan Tanggal Penerimaan Penghargaan	Dokumentasi (Foto Piagam dan Piala/Foto Saat Penerimaan Penghargaan)
1	2	3	4	5	6
1	Terbaik IV Kategori Kecamatan dengan Kualifikasi MENUJU INFORMATIF Dalam Pemeringkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan Nagari Tingkat Kab. Pesisir Selatan 2021.	Bupati Pesisir Selatan	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	Painan, 23 November 2021	

BAB III

PENUTUP


Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Akhir Tahun Anggaran 2021 (LKPj) merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan pembangunan.

Secara prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berjalan cukup optimal meskipun terjadi bencana non alam Pandemi COVID-19, merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi serta efektivitas pembangunan oleh seluruh elemen pemerintahan yang tercermin dalam pencapaian target pembangunan. Lain sisi masih terdapat beberapa kelemahan dan permasalahan yang muncul yang salah satunya diakibatkan oleh berbagai dinamika global maupun perkembangan eksternal yang kurang terantisipasi. Berbagai kelemahan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Tahun Anggaran 2021 patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen kecamatan.

Demikian penyampaian Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Akhir Tahun Anggaran 2021, dengan harapan semoga kinerja tugas yang dilimpahkan senantiasa dapat lebih baik dan memiliki daya guna bagi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan dan petunjuk-NYA kepada kita semua.

Pasar Beriang, 31 Desember 2021
CAMAT,

MAR ALAMSYAH, SSTP, M.A
Pembina/ IV a
NIP.19830310 200112 1 001

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
TAHUN ANGGARAN 2021

A. PROGRAM DAN KEGIATAN
URUSAN KEWILAYAHAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	Realisasi Keuangan		
		Jumlah Dana	Jml. Realisasi Keu (Rp.)	% Keu
1	2	3	4	5
	KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN	1.629.948.874	1.507.071.545	92,46
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1.486.400.994	1.378.578.045	92,75
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.026.100	8.952.000	99,18
	1). Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.150.000	6.150.000	100,00
	Belanja Barang dan Jasa	6.150.000	6.150.000	100,00
	2). Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.876.100	2.802.000	97,42
	Belanja Barang dan Jasa	2.876.100	2.802.000	97,42
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.241.378.031	1.134.701.737	91,41
	1). Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.173.578.031	1.067.094.237	
	Belanja Barang dan Jasa	1.173.578.031	1.067.094.237	
	2). Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	67.800.000	67.607.500	99,72
	Belanja Barang dan Jasa	67.800.000	67.607.500	99,41
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	129.512.160	128.913.680	99,54
	1). Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.817.780	4.764.000	98,88
	Belanja Barang dan Jasa	4.817.780	4.764.000	99,54
	2). Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.920.740	24.751.500	99,32
	Belanja Barang dan Jasa	24.920.740	24.751.500	99,54
	3). Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.137.580	15.905.000	98,56
	Belanja Barang dan Jasa	16.137.580	15.905.000	99,54
	4). Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.731.180	6.700.300	99,54
	Belanja Barang dan Jasa	6.731.180	6.700.300	99,54
	5). Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.199.880	1.199.880	100,00
	Belanja Barang dan Jasa	1.199.880	1.199.880	99,54
	6). Fasilitas Kunjungan Tamu	9.975.000	9.973.000	99,98
	Belanja Barang dan Jasa	9.975.000	9.973.000	99,54
	7). Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.730.000	65.620.000	99,83
	b. Belanja Barang dan Jasa	65.730.000	65.620.000	99,54
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	965.360	960.000	99,44
	1). Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	965.360	960.000	99,44
	Belanja Barang dan Jasa	965.360	960.000	99,44
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.188.493	67.066.298	99,82
	1). Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.438.493	8.316.298	98,55
	Belanja Barang dan Jasa	8.438.493	8.316.298	99,82
	2). Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	58.750.000	58.750.000	100,00
	Belanja Barang dan Jasa	58.750.000	58.750.000	99,82
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.330.850	37.984.330	99,40
	1). Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.765.500	30.581.560	99,40
	Belanja Barang dan Jasa	30.765.500	30.581.560	99,40
	2). Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.850.000	4.727.770	97,48
	Belanja Barang dan Jasa	4.850.000	4.727.770	99,40
	3). Pemeliharaan/ Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	2.715.350	2.675.000	98,51
	Belanja Barang dan Jasa	2.715.350	2.675.000	99,40

II	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		38.403.000	35.417.500	92,23
	1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	12.473.000	9.615.000	77,09
		1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	12.473.000	9.615.000	77,09
		Belanja Barang dan Jasa	12.473.000	9.615.000	77,09
	2	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	25.930.000	25.802.500	99,51
		1) Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	25.930.000	25.802.500	99,51
		Belanja Barang dan Jasa	25.930.000	25.802.500	99,51
III	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		79.103.680	67.131.000	84,86
	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	79.103.680	67.131.000	84,86
		1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	79.103.680	67.131.000	84,86
		a) Belanja Barang dan Jasa	79.103.680	67.131.000	84,86
IV	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa		6.100.000	6.100.000	100,00
	1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6.100.000	6.100.000	100,00
		1) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6.100.000	6.100.000	100,00
		Belanja Barang dan Jasa	6.100.000	6.100.000	100,00
V	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		19.941.200	19.845.000	99,52
	1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	19.941.200	19.845.000	99,52
		1) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	-	-	-
		Belanja Barang dan Jasa	-	-	99,52
		2) Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	19.941.200	19.845.000	99,52
		Belanja Barang dan Jasa	19.941.200	19.845.000	99,52

B. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Daerah Kabupaten/ Kota

Program ini dengan pagu anggaran Rp 1.486.400.994 dengan realisasi anggaran Rp 1.378.578.045 (92,75%). Hasil/ keluaran adalah penunjang operasional Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan.

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini dengan pagu anggaran Rp 38.403.000 dengan realisasi anggaran Rp 35.417.500 (92,23%). Hasil/ keluaran adalah Pembinaan PKK, Kegiatan BBGRM, Musrenbang Kecamatan.

3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini dengan pagu anggaran Rp 79.103.680 dengan realisasi anggaran Rp 67.131.000 (84,86%). Hasil/ keluaran adalah Kegiatan PATEN dan Penanganan Covid-19.

4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

Program ini dengan pagu anggaran Rp 6.100.000,- dengan realisasi anggaran Rp 6.100.000,- (100%). Hasil/ keluaran adalah Pembinaan Pemerintahan Nagari

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini dengan pagu anggaran Rp 19.941.200 dengan realisasi anggaran Rp 19.845.000 (99,52%). Hasil/ keluaran adalah pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional di Camat dan Koordinasi antar Pimpinan Kecamatan.

C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Dari evaluasi terhadap rencana dan pelaksanaan kegiatan tahun yang lalu terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Ketersediaan anggaran untuk kecamatan yang terbatas khususnya untuk anggaran Penunjang Kegiatan PATEN.
2. Masih kurangnya tenaga PNS di Kantor Camat

Upaya dalam mengatasi permasalahan sebagaimana dimaksud di atas telah dilaksanakan oleh kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, antara lain sebagai berikut :

1. Untuk menangani keterbatasan dana yang ada dalam pagu anggaran kantor Camat telah berusaha menggunakan anggaran semaksimal mungkin.

2. Untuk mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana di Kantor Camat telah memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada.



2.2 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Tabel 2.2

CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN TAHUN ANGGARAN 2021

NO	URUSAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANAAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PERMASALAHAN	SOLUSI	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
1	Kewilayahan	CAMAT Ranah Ampek Hulu Tapan	Perda Kab. Pessel No 1 Tahun 2021 tentang APBD Kab. Pessel T.A 2021; Perbup Kab. Pessel No 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Kab. Pessel T.A 2021	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Terpenuhi nya Layanan Administrasi perkantoran, Terpenuhi nya kebutuhan sarana dan prasarana Aparatur	Bulan	12 bulan	12 bulan	1.486.400.994	tidak ada permasalahan	-	-

2	Kewilayahan	CAMAT Ranah Ampek Hulu Tapan	Perda Kab. Pessel No 1 Tahun 2021 tentang APBD Kab. Pessel T.A 2021; Perbup Kab. Pessel No 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Kab. Pessel T.A 2021	Program Pemberday aan Masyaraka t Desa dan Kelurahan	Terlaksana nya Pembinaan PKK, Kegiatan BBGRM, Musrenban g Kecamatan.	Bulan	12 bulan	12 bulan	38.403.000	tidak ada perma salaha n	-	-
3	Kewilayahan	CAMAT Ranah Ampek Hulu Tapan	Perda Kab. Pessel No 1 Tahun 2021 tentang APBD Kab. Pessel T.A 2021; Perbup Kab. Pessel No 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Kab. Pessel T.A 2021	Program Penyelengg araan Pemerintah an dan Pelayanan Publik	Terlaksana nya Kegiatan PATEN dan Penangana n Civid-19.	Bulan	12 bulan	12 bulan	79.103.680	tidak ada perma salaha n	-	-

4	Kewilayahan	CAMAT Ranah Ampek Hulu Tapan	Perda Kab. Pessel No 1 Tahun 2021 tentang APBD Kab. Pessel T.A 2021; Perbup Kab. Pessel No 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Kab. Pessel T.A 2021	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Terlaksana nya Pembinaan Pemerintah an 10 Nagari	Bulan	12 bulan	12 bulan	6.100.000	tidak ada perma salaha n	-	-
5	Kewilayahan	CAMAT Ranah Ampek Hulu Tapan	Perda Kab. Pessel No 1 Tahun 2021 tentang APBD Kab. Pessel T.A 2021; Perbup Kab. Pessel No 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Kab. Pessel T.A 2021	Program Penyelengg araan Urusan Pemerintah an Umum	Terlaksana nya Peringatan Hari Besar Nasional di Camat dan Koordinasi antar Pimpinan Pimpinan Kecamatan.	Bulan	12 bulan	12 bulan	19.941.200	tidak ada perma salaha n	-	-